

# **TINJAUAN ATAS KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN PERPAJAKAN PT SPM**



## **SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh  
gelar  
Sarjana Ekonomi

**Oleh:**

**Reinaldo Wailandi Pasaribu**

**201130193**

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN  
FAKULTAS EKONOMI  
PROGRAM SARJANA AKUNTANSI  
Terakreditasi oleh BAN-PT No. 2011/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2018  
BANDUNG  
2018**

**OVERVIEW OF ACCOUNTING POLICIES AND  
TAXATION PT SPM**



**UNDERGRADUATE THESIS**

*Submitted to complete part of the requirements  
for Bachelor's Degree in Economics*

**By**

**Reinaldo Wailandi Pasaribu**

**2011130193**

**PARAHYANGAN CATHOLIC UNIVERSITY  
FACULTY OF ECONOMICS  
PROGRAM IN ACCOUNTING  
Accredited by National Accreditation Agency  
No. 2011/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2018  
BANDUNG  
2018**

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN  
FAKULTAS EKONOMI  
PROGRAM SARJANA AKUNTANSI**



**PERSETUJUAN SKRIPSI  
TINJAUAN ATAS KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN  
PERPAJAKAN PT SPM**

Oleh:  
Reinaldo Wailandi Pasaribu  
2011130193

Bandung, Agustus 2018

Ketua Program Sarjana Akuntansi,

Gery Raphael Lusanjaya, S.E., M.T.

Pembimbing Skripsi,

Verawati Suryaputra, S.E.,  
MM., Ak.

Ko-pembimbing Skripsi,

Puji Astuti Rahayu,  
S.E, M.Ak, Ak.

# PERNYATAAN

Saya yang bertanda-tangan di bawah ini,

Nama : Reinaldo Wailandi Pasaribu  
Tempat, tanggal lahir : Lampung, 10 Mei 1993  
NPM : 2011130193  
Program studi : Akuntansi  
Jenis Naskah : Skripsi

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

“TINJAUAN ATAS KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN PERPAJAKAN PT SPM”

Yang telah diselesaikan dibawah bimbingan : Verawati Suryaputra, S.E., MM., Ak.  
dan Puji Astuti Rahayu, SE., M.Ak., Ak.

Adalah benar-benar karyatulis saya sendiri;

1. Apa pun yang tertuang sebagai bagian atau seluruh isi karya tulis saya tersebut di atas dan merupakan karya orang lain (termasuk tapi tidak terbatas pada buku, makalah, surat kabar, internet, materi perkuliahan, karya tulis mahasiswa lain), telah dengan selayaknya saya kutip, sadur atau tafsir dan jelas telah saya ungkap dan tandai
2. Bahwa tindakan melanggar hak cipta dan yang disebut, plagiat (Plagiarism) merupakan pelanggaran akademik yang sanksinya dapat berupa peniadaan pengakuan atas karya ilmiah dan kehilangan hak kesarjanaan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan oleh pihak mana pun.

Pasal 25 Ayat (2) UU No.20 Tahun 2003: Lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik, profesi, atau vokasi terbukti merupakan jiplakan dicabut gelarnya. Pasal 70 Lulusan yang karya ilmiah yang digunakannya untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Ayat (2) terbukti merupakan jiplakan dipidana dengan pidana perkara paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 200 juta.

Bandung,

Dinyatakan tanggal : Agustus 2018

Pembuat pernyataan : Reinaldo Wailandi



( Reinaldo Wailandi P.)

## ABSTRAK

Dalam APBN terdapat berbagai macam penerimaan negara yang diperoleh Pemerintah, yaitu penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak dan hibah. Penerimaan tersebut digunakan oleh Pemerintah untuk tujuan pembangunan nasional. Sistem pemungutan pajak yang digunakan oleh negara Indonesia saat ini adalah menggunakan *Self Assesment System* yang berarti masyarakat diberi kewenangan untuk menghitung, melaporkan, dan membayar pajaknya sendiri.

Perusahaan akan berusaha mencari cara agar dapat mengefisiensikan besarnya beban pajak yang harus dibayar sehingga perusahaan dapat memperoleh laba yang optimal. Salah satu caranya adalah dengan membebaskan biaya yang diperbolehkan oleh undang-undang perpajakan sebagai pengurang laba perusahaan untuk menurunkan beban pajak. Maka perusahaan perlu menyusun laporan keuangan sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku saat ini.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, artinya metode penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, memahami, dan menyusun data perusahaan agar mendapatkan gambaran yang cukup jelas mengenai objek penelitian yang akan diteliti di perusahaan tersebut. Teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan adalah dengan melakukan wawancara kepada salah satu staf PT SPM dan memperoleh data lainnya dari PT SPM.

PT SPM belum melakukan koreksi fiskal sehingga masih ditemukan adanya akun-akun yang harus dikoreksi oleh PT SPM yaitu dalam biaya operasi usaha perusahaan yang tidak bisa menjadi beban bagi perusahaan. Maka dapat disimpulkan bahwa dalam biaya operasi usaha tersebut terdapat potensi pajak terutang bagi PT SPM. PT SPM sebaiknya melakukan koreksi fiskal dan pembetulan SPT agar tidak terkena sanksi administrasi yang harus dibayar sebesar Rp 85.195.625

Kata kunci: Laporan Keuangan, Beban, Koreksi Fiskal

## ***ABSTRACT***

*In State Budget there were many kind of national income that government collected, namely tax income, non-tax income, and bequest. That income used by government is for national development. The tax collection system used by the Indonesian state now is Self Assessment System which mean the taxpayers are required to calculate, report, and pay the tax itself.*

*Companies will try to find ways to can minimize the amount of tax burden to be paid so the company can get the optimal profit. One way to do it is to find the costs that can be recognized as a deduction of corporate profits to lower the tax burden. So the preparation of a good financial statements must be in accordance with current tax rules.*

*This study uses descriptive method, which is used to collecting, understanding, and compiling company data to get a fairly clear picture of the object research that will be reviewed in company. The data collection technique that the researchers did was by conducting an interview with one of PT SPM staff and obtaining other data from PT SPM.*

*PT SPM not make fiscal correction so that there are still accounts that must be corrected by PT SPM in the operating cost of the company's business that can't be expense for the company. Then it can be concluded that in the operating cost of the business there is potential for tax payable. PT SPM should to do fiscal correction and amendment annual tax return so there is no administrative charge to be paid.*

*Keyword: Financial Statements, Expense, Fiscal Correction*

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan rahmat-Nya pada akhirnya peneliti dapat menyelesaikan skripsi mengenai *tax review* PT SPM. Skripsi ini disusun dengan tujuan agar memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi, Program Studi Akuntansi di Fakultas Ekonomi, Universitas Katolik Parahyangan.

Dalam menyusun skripsi ini, peneliti menghadapi berbagai macam hambatan dan kesulitan. Namun hal tersebut telah diatasi dengan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Dengan keterbatasan waktu, pengetahuan, dan informasi menyebabkan skripsi ini masih belum sempurna dari yang seharusnya ditetapkan karena masih terdapat kekurangan materi. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan kritik dan saran untuk melengkapi kekurangan yang ada dalam skripsi ini.

*Dalam kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:*

1. Keluarga peneliti yaitu Papa, Mama, Kakak Tirta, Eaufira, dan Jeremy yang sudah memberikan dukungan dan doa selama penyusunan skripsi ini.
2. Ibu Verawati Suryaputra, S.E., MM., Ak. selaku dosen pembimbing dalam penyusunan skripsi ini yang telah memberikan banyak bimbingan, bantuan, motivasi serta nasihat bermakna sampai skripsi ini selesai. Peneliti juga memberikan dukungan kepada Ibu Verawati agar dapat menyelesaikan studi S3 dengan lancar.
3. Ibu Puji Astuti Rahayu, SE., M.Ak., Ak. selaku dosen ko-pembimbing yang telah memberikan waktu bimbingan dan dukungan kepada peneliti untuk dapat memperbaiki bab-bab dalam skripsi yang sudah dijelaskan.
4. Bapak Gery Raphael Lusanjaya, S.E., M.T. selaku Ketua Jurusan Akuntansi dan dosen wali peneliti yang sudah memberikan bantuan atas perpanjangan penyusunan skripsi ini.

5. Bapak Drs. Tulis S. Meliala, Ak. yang sudah memberikan nasihat dan data yang diperlukan oleh peneliti.
6. PT SPM yang sudah mengizinkan peneliti untuk melakukan penelitian di perusahaannya
7. Sepupu peneliti di Lampung dan yang sudah mendoakan peneliti untuk dapat menyelesaikan skripsi dengan cepat dan lancar.
8. Seluruh dosen dan staf lain yang ada di Universitas Katolik Parahyangan yang telah memberikan ilmu dan wawasan selama di perkuliahan.
9. Alvin sebagai teman seperjuangan saat penyusunan skripsi dan teman berbagi suka dan duka semasa perkuliahan.
10. Bapak/Ibu dosen penguji yang telah meluangkan waktunya.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan oleh peneliti seluruhnya atas dukunngan yang telah diberikan dalam penyusunan skripsi.

Semoga skripsi ini diharapkan peneliti dapat berguna bagi seluruh pihak yang membutuhkan untuk keperluan tertentu.

Bandung, Agustus 2018

Peneliti



## DAFTAR ISI

	<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
	<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vii</b>
	<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xi</b>
	<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xii</b>
	<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB 1</b>	<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
	1.1. Latar Belakang Penelitian .....	1
	1.2. Identifikasi Masalah .....	2
	1.3. Tujuan Penelitian .....	2
	1.4. Manfaat Penelitian .....	3
	1.5. Kerangka Pemikiran.....	3
<b>BAB 2</b>	<b>TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>5</b>
	2.1. Teori Dasar Perpajakan .....	5
	2.1.1. Pengertian Pajak.....	5
	2.1.2. Fungsi Pajak.....	5
	2.1.3. Teori Pemungutan Pajak .....	6
	2.1.4. Asas Pemungutan Pajak .....	7
	2.1.5. Hukum Pajak.....	8
	2.1.6. Sistem Pemungutan Pajak .....	9
	2.2. Pajak Penghasilan.....	10
	2.2.1. Subjek Pajak Penghasilan .....	10
	2.2.2. Objek Pajak Penghasilan.....	12
	2.2.3. Tarif Pajak Penghasilan.....	16
	2.2.4. Biaya Fiskal.....	19
	2.2.5. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) .....	20
	2.2.6. Tata Cara Perhitungan Pajak Penghasilan.....	20
	2.3. Manajemen Pajak .....	21

2.3.1.	Pengertian Manajemen Pajak.....	21
2.3.2.	Tujuan Manajemen Pajak.....	21
2.4.	Akuntansi Pajak .....	22
2.4.1.	Pengertian Akuntansi Pajak .....	22
2.4.2.	Kebijakan Akuntansi .....	23
2.4.3.	Laporan Keuangan Menurut Akuntansi dan Pajak .....	23
2.4.4.	Hubungan Perlakuan Akuntansi dan Perlakuan Pajak ...	24
<b>BAB 3</b>	<b>METODE PENELITIAN.....</b>	<b>25</b>
3.1.	Metode Penelitian.....	25
3.2.	Unit Penelitian.....	28
3.2.1.	Profil Singkat PT SPM.....	28
3.2.2.	Visi dan Misi.....	28
3.2.3.	Struktur Organisasi PT SPM.....	29
<b>BAB 4</b>	<b>HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>33</b>
4.1.	Kebijakan Akuntansi pada PT SPM.....	33
4.2.	Kebijakan Perpajakan pada PT SPM .....	35
4.3.	Laporan Keuangan .....	38
4.4.	Penerapan Akuntansi Perpajakan Atas Biaya Operasi Usaha PT SPM.....	41
4.5.	Koreksi Fiskal Hasil Penelitian.....	45
4.6.	Sanksi Administrasi .....	51
4.7.	Hasil Penelitian Atas Kebijakan Akuntansi dan Perpajakan PT SPM.....	52
<b>BAB 5</b>	<b>KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>53</b>
5.1.	Kesimpulan .....	53
5.2.	Saran.....	55
	<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
	<b>LAMPIRAN</b>	
	<b>RIWAYAT HIDUP PENELITI</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Contoh Unsur Subjektif .....	7
Tabel 2.2	Tarif Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi.....	16
Tabel 2.3	Tarif Pajak Atas Objek PPh Final .....	17
Tabel 2.4	Tata Cara Perhitungan Pajak.....	20
Tabel 4.1	Masa Manfaat Aset Tetap PT SPM .....	34
Tabel 4.2	Masa Manfaat Aset Tetap PT SPM (Perpajakan).....	37
Tabel 4.3	SPT PPh Badan PT SPM .....	39
Tabel 4.4	Laporan Keuangan PT SPM .....	39
Tabel 4.5	Biaya Kendaraan .....	42
Tabel 4.6	Daftar Penyusunan Aset Tetap.....	44
Tabel 4.7	Biaya Kendaraan Tahun 2016.....	45
Tabel 4.8	Biaya Telepon Tahun 2016 .....	46
Tabel 4.9	Biaya Jamuan Tahun 2016 .....	47
Tabel 4.10.	Biaya Kesejahteraan Karyawan Tahun 2016 .....	48
Tabel 4.11.	Biaya Keamanan Tahun 2016 .....	49
Tabel 4.12.	Biaya Iklan Tahun 2016 .....	50
Tabel 4.13.	Perbandingan Koreksi Fiskal .....	51

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Bagan Kerangka Pemikiran.....	4
Gambar 3.1.	Langkah-Langkah Penelitian.....	27
Gambar 3.2.	Struktur Organisasi PT SPM.....	32

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1. Buku Besar Biaya Operasi Usaha PT SPM
- Lampiran 2. Neraca PT SPM
- Lampiran 3. SPT PPh Badan PT SPM
- Lampiran 4. SPT PPh Badan Pembetulan-1 PT SPM
- Lampiran 5. SPT PPh Badan Pembetulan-2 PT SPM

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Penelitian

Dalam APBN terdapat berbagai macam penerimaan negara yang diperoleh Pemerintah, yaitu penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak dan hibah. Penerimaan perpajakan terdiri dari pendapatan pajak dalam negeri (PPh, PPN dan PPnBM, PBB, dan pendapatan pajak lainnya) dan pendapatan pajak internasional (pendapatan bea masuk dan keluar). Sedangkan penerimaan negara bukan pajak terdiri dari penerimaan sumber daya alam, pendapatan bagian laba BUMN, pendapatan Badan Layanan Umum, dan PNBP lainnya. Penerimaan perpajakan merupakan sumber penerimaan terbesar dalam APBN. Maka dari itu, Pemerintah perlu mengumpulkan penerimaan dari pajak seoptimal mungkin agar dapat digunakan untuk tujuan pembangunan nasional.

Dalam rangka mengoptimalkan penerimaan pajak yang diperoleh, Direktorat Jenderal Pajak telah beberapa kali melakukan reformasi pajak. Salah satu bentuk reformasi pajak yang dilakukan adalah mengenai pemungutan pajak. Sistem pemungutan pajak negara Indonesia sebelumnya menggunakan *Official Assesment System*, di mana sistem ini memberikan wewenang kepada Pemerintah untuk menghitung dan menentukan besarnya pajak yang terutang bagi wajib pajak. Negara Indonesia kemudian beralih menggunakan sistem pemungutan pajak *Self Assesment System*, di mana wajib pajak diberikan kewenangan untuk dapat menghitung sendiri pajak yang harus dibayar tepat waktu dan melaporkannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Sistem ini diterapkan dengan harapan kesadaran wajib pajak menjadi tinggi sehingga penerimaan pajak juga menjadi semakin bertambah.

Namun target penerimaan pajak sulit untuk dicapai karena terdapat berbagai macam hambatan yang muncul, salah satunya adalah tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah. Penyebab tingkat kepatuhan wajib pajak rendah adalah tidak mendapat imbalan secara langsung dari pajak dan dianggap perusahaan sebagai beban. Menurut Ompusunggu (2011:3), meskipun tidak bisa diselaraskan antara jumlah pajak yang dibayar dan fasilitas yang akan diterima oleh warga pembayar pajak dari negara, semangat membayar pajak harus tetap ada. Untuk meminimalkan beban pajak yang

ditanggung wajib pajak dapat ditempuh dengan melakukan penyusunan SPT Tahunan PPh Badan secara benar, jelas dan lengkap berdasarkan laporan keuangan yang ada dengan mengikuti ketentuan peraturan perpajakan. Pengetahuan wajib pajak yang memadai merupakan langkah penting karena berguna untuk memanfaatkan celah-celah yang ada dalam aturan perpajakan.

Laporan keuangan harus disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan aturan perpajakan. Salah satu komponen dalam laporan keuangan yang perlu perusahaan perhatikan adalah biaya. Di mana terdapat biaya fiskal yang dapat dibebankan sebagai pengurang pajak (*Deductible*) dan tidak dapat dibebankan (*Non-Deductible*) sesuai dengan Undang- Undang No.36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan pasal 6 ayat (1) dan pasal 9 ayat (1).

Menimbang hal-hal tersebut di atas, penelitian ini berusaha mendalami pemahaman tentang kebijakan akuntansi dan perpajakan perusahaan dan sanksi yang mungkin dikenakan apabila ada biaya-biaya belum diakui seluruhnya oleh perusahaan. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan PT SPM.

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti hendak mengungkapkan beberapa permasalahan yaitu:

1. Bagaimana kebijakan akuntansi dan perpajakan PT SPM dalam penyusunan laporan keuangan ?
2. Apakah terdapat sanksi perpajakan yang mungkin dikenakan kepada PT SPM berdasarkan hasil penelitian tersebut ?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan di atas, hasil penelitian memiliki tujuan untuk:

1. Memahami kebijakan akuntansi dan perpajakan PT SPM dalam penyusunan laporan keuangan.
2. Mengetahui sanksi perpajakan yang mungkin dikenakan kepada PT SPM berdasarkan hasil penelitian.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian peneliti ini diharapkan dapat berguna bagi beberapa pihak, yaitu sebagai berikut:

1. Bagi perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi perusahaan atas biaya-biaya atau pendapatan yang masih dapat atau belum diakui dalam menghitung pajak yang seharusnya terutang.

2. Bagi pihak lain

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk membuat artikel atau skripsi yang berkaitan dengan kebijakan akuntansi dan perpajakan.

#### **1.5. Kerangka Pemikiran**

Pajak merupakan salah satu sumber dana bagi Pemerintah untuk membangun negara. Semua wajib pajak memiliki kewajiban untuk membayar pajak kepada Pemerintah atas penghasilan yang diperolehnya. Setelah reformasi perpajakan dijalankan, sistem perpajakan berubah dari *official assessment* menjadi *self assessment*. Dengan sistem *self assessment*, wajib pajak memiliki kewenangan dan kewajiban untuk menghitung, membayar, dan melaporkan jumlah pajak yang terutang. Hal tersebut dapat berjalan dengan lancar apabila wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku.

Fakta bahwa kebanyakan perusahaan didirikan dengan tujuan memperoleh laba semaksimal mungkin. Perusahaan akan berusaha mencari cara agar dapat mengefisienkan besarnya beban pajak yang harus dibayar sehingga perusahaan dapat memperoleh laba yang optimal.

Terdapatnya perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya antara Standar Akuntansi Keuangan dan Peraturan Perpajakan menuntut adanya pemahaman yang memadai di kedua bidang ilmu tersebut. Tujuan Perusahaan untuk memaksimalkan laba setelah pajak (*after tax return*) mau tidak mau harus mempertimbangkan unsur pajak, karena pajak akan ikut mempengaruhi pengambilan keputusan atas suatu tindakan dalam operasi perusahaan untuk melakukan investasi melalui analisis yang cermat dan pemanfaatan peluang dan kesempatan yang ada dalam ketentuan peraturan yang sengaja dibuat pemerintah.

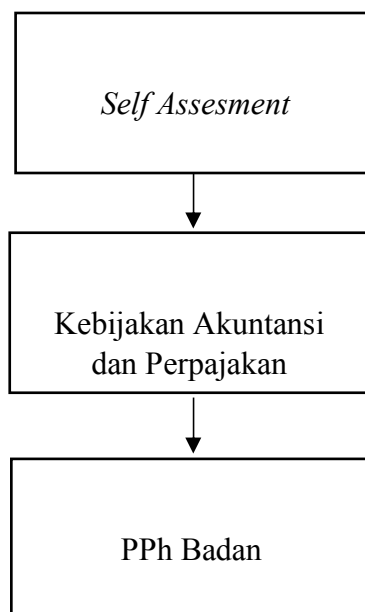


Dalam perkembangan teknologi dan informasi yang semakin pesat seorang manajer dalam menyusun laporan keuangan harus memperhitungkan adanya kegiatan yang bersifat lokal maupun internasional, agar penyusunan SPT Tahunan PPh Badan nantinya dapat berhasil sesuai dengan yang diharapkan.

Tujuan dari penyusunan laporan keuangan adalah menggambarkan kondisi perusahaan saat ini dan dievaluasi oleh pihak lain untuk dapat mengambil keputusan. Biaya-biaya dalam laporan keuangan perusahaan dapat mempengaruhi besarnya PPh terutang berdasarkan biaya yang dapat diakui dan tidak dapat diakui oleh perusahaan. Menurut Pohan (2016:241), implementasi dari konsep *taxability deductibility*, juga berarti bahwa biaya-biaya baru dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dari pihak pembayar apabila pihak penerima uang atas biaya perusahaan tersebut melaporkannya sebagai penghasilan dan penghasilan tersebut dikenakan pajak. Maka penyusunan laporan keuangan yang baik haruslah memahami peraturan perpajakan yang berlaku serta mengikuti perkembangan informasi dan perubahan yang terjadi dalam peraturan undang-undang perpajakan.

Adapun kerangka pemikiran yang mendasari penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

**Gambar 1.1**  
**Bagan Kerangka Pemikiran**



Sumber: Diolah Peneliti